

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Di era Globalisasi yang semakin maju ini, ada banyak perusahaan yang berkembang pesat dalam kaitannya dengan perkembangan teknologi dan informasi terutama dalam hal berbagi informasi. Informasi saat ini merupakan aset yang sangat penting untuk memenangkan persaingan dalam dunia bisnis. Sistem Informasi adalah suatu sistem dengan sistem lain yang saling berhubungan untuk mendukung pengoperasian. Sistem informasi yang dirancang dengan baik memungkinkan informasi yang dihasilkan menjadi ringkas dan akurat, sehingga memungkinkan suatu perusahaan lebih baik dalam bersaing dengan perusahaan lain. Sistem informasi yang dirancang baik sedemikian rupa akan mengarah pada keputusan yang sangat tepat dan akan membantu perusahaan mencapai tujuan yang mereka inginkan sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan itu, perusahaan juga perlu menerapkan dan mengembangkan sistem informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan yang tepat dan dapat mampu mengendalikan kegiatan operasional yang berlangsung.

Sistem informasi akuntansi adalah kumpulan berbagai catatan, formulir, dan laporan yang dirancang untuk menyediakan data keuangan yang dibutuhkan bisnis. Sistem informasi akuntansi menurut Krismiaji dalam Pandji (2010:4), adalah sistem yang mengolah data dan transaksi untuk menyediakan informasi yang berharga bagi perencanaan, pengendalian, dan operasi perusahaan. Semua bisnis yang mapan sangat bergantung pada akuntansi karena ini adalah sistem informasi yang memberi tahu orang yang berwenang di dalam bisnis tentang operasi ekonomi, serta keadaan internal dan eksternal bisnis.

Piutang negara pada umumnya adalah hak atas uang, barang, dan jasa milik orang lain. Menurut Subroto (1991:63), “Untuk tujuan akuntansi, piutang adalah tagihan (klaim) kepada pihak ketiga atas uang, produk, atau jasa.”

Menurut definisi tersebut di atas, piutang didefinisikan sebagai faktur masa depan yang akan dikeluarkan oleh bisnis untuk penyediaan produk atau jasa kepada konsumen dan yang akan dibayar dengan uang tunai. Berikut pengertian piutang negara menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia: Piutang negara mengacu pada jumlah sejumlah uang yang harus dibayarkan kepada Negara atau organisasi lain yang secara langsung atau tidak langsung berada di bawah yurisdiksi Negara sebagai akibat suatu peraturan, perjanjian, atau keadaan lain.

Di sisi lain, definisi tagihan pemerintah menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 240/PMK.06/2016 tentang pengelolaan tagihan pemerintah berlaku sebagai berikut. “Tagihan pemerintah adalah jumlah yang harus dibayar kepada pemerintah, atau membuat suatu badan secara langsung atau tidak langsung dengan penguasaan negara berdasarkan peraturan, kesepakatan, atau alasan lain.” Peraturan Lainnya berpendapat, pengertian tagihan pemerintah berdasarkan Keputusan No. 14 Tahun 2005 tentang tata cara pencabutan klaim negara/daerah adalah sebagai berikut: Atau implikasi hukum lainnya.

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Piutang Negara adalah jumlah yang harus dibayarkan kepada pemerintah pusat dan daerah dengan perjanjian yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam hal piutang, sangat penting untuk memiliki prosedur yang mencakup penerapan teknik pencatatan yang baik untuk menghindari kesalahan dan kecurangan. Piutang merupakan salah satu item aset lancar yang dapat dengan mudah disalahgunakan oleh

pemangku kepentingan atau pemegang internal. Itu sebabnya memerlukan sistem piutang untuk mencegah penipuan penagihan, dan pada saat yang sama, adalah alat untuk melindungi aset perusahaan Anda.

Pada KPKNL Purwokerto sistem pengelolaan piutang tersebut sudah menggunakan system tersendiri yang sangat membantu pekerjaan agar lebih teliti, cepat dan aman data-data debitur itu tersimpan. Menjadikan lebih cepat mengontrol debitur dalam membayar pelunasan piutang atau macet piutang akan lebih memudahkan untuk KPKNL Purwokerto menindak lanjuti persolaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil Judul Tugas Akhir “Sistem Informasi Akuntansi Kepengurusan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto”

## **1.2.Rumusan Masalah**

1. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya adalah bagaimana KPKNL Purwokerto mengelola kepengurusan piutang negara ?
2. Apakah pengelolaan kepengurusan piutang negara pada KPKNL Purwokerto telah sesuai dengan standar akuntansi piutang negara?

## **1.3.Maksud Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan**

### **1. Maksud Praktek Kerja Lapangan**

- a. Untuk memahami dan mengetahui sistem kepengurusan piutang negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Purwokerto sudah sesuai dengan sistem akuntansi piutang negara yang berlaku.
- b. Untuk melengkapi sebagian syarat kelulusan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana sistem informasi yang digunakan dapat mempermudah segala urusan piutang negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Purwokerto.

## **2. Tujuan Praktek Kerja Lapangan**

- a. Untuk mengetahui bagaimana kepengurusan piutang negara pada KPKNL Purwokerto.
- b. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian kepengurusan piutang negara pada KPKNL Purwokerto dengan standar akuntansi piutang negara.

## **3. Manfaat Praktek Kerja Lapangan**

- a. Manfaat Bagi Mahasiswa
  1. Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan di Prodi Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
  2. Menambah wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa tentang piutang negara.
  3. Sebagai sarana penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang informasi akuntansi piutang negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto
- b. Manfaat Bagi Program Studi Akuntansi DIII Fakultas Ekonomi dan Bisnis
  1. Sebagai acuan dan referensi bahan evaluasi.
  2. Mempunyai rekan kerjasama untuk mempromosikan universitas kepada perusahaan.
- c. Manfaat Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk dasar pemecahan masalah yang dihadapi agar dapat menjalankan pekerjaan secara efisien dan efektif.

### **1.4.Pembatasan Masalah**

Pada penulisan Laporan Tugas Akhir ini penulis membatasi permasalahan yang akan di bahas. Penulisan ini dibatasi hanya pada Sistem Informasi Akuntansi Kepengurusan Piutang Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto.

## 1.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk memperoleh beberapa informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari tempat praktek kerja lapangan. Ada dua metode dalam data primer yang dapat diperoleh, yaitu dengan cara:

#### a. Metode Observasi

Didapat dengan meneliti sumber yang mendukung laporan praktek kerja di lapangan. Data tersebut diperoleh dari data yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi kepengurusan piutang negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto.

#### b. Metode Wawancara

Dilakukan melalui wawancara kepada pegawai dengan mengajukan pertanyaan secara langsung yang menyangkut tentang sistem informasi akuntansi kepengurusan piutang negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan dan dapat diperoleh dengan menggunakan dua metode, yaitu:

#### a. Metode Dokumentasi

Data yang dapat diperoleh dengan melihat arsip-arsip yang telah tersimpan di Gudang Arsip ruang Piutang Negara, yang terdiri dari banyak kumpulan data-data para debitur.

#### b. Metode Studi Pustaka

Data yang dapat diperoleh dari buku yang ada di lingkungan tempat Praktik Kerja Lapangan yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi kepengurusan piutang negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto.

## 1.6. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

### a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan yaitu tahap awal yang harus dilakukan untuk:

1. Mengurus surat izin kepada fakultas untuk melaksanakan praktik kerja lapangan.
2. Mengurus perizinan pada tempat praktik kerja lapangan.
3. Mengajukan usulan judul laporan praktik kerja lapangan kepada dosen pembimbing.
4. Melaksanakan tempat praktik kerja lapangan sesuai dengan jadwal kegiatan yang sudah ditentukan.

### b. Tahap Pelaksanaan

Tempat Praktik Kerja Lapangan : Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Purwokerto

Bagian : Seksie Piutang Negara

Waktu Pelaksanaan : 14 Maret – 27 April 2022

### c. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap penyusunan laporan dilakukan jika semua data dan informasi yang diperlukan sudah lengkap, berikut ini tahap-tahap penyusunan laporan:

1. Menyiapkan data-data yang diperlukan untuk dituliskan pada hasil laporan praktik kerja lapangan.
2. Menyusun laporan praktik kerja lapangan dari bagian awal hingga kesimpulan.
3. Mendiskusikan atau melaporkan hasil laporan praktik kerja lapangan pada dosen pembimbing.
4. Melakukan perbaikan jika laporan praktik kerja lapangan masih kurang sempurna

d. Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktik Lapangan

Berikut ini adalah jadwal praktik kerja lapangan selama 32 hari di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto:

Tabel 1 Jadwal Praktik Kerja Lapangan

No	Keterangan	Februari				Maret				April				Mei - Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tahap Persiapan																	
1.	Melakukan Observasi Lokasi Ke PKL																
2.	Meminta surat pengantar dari fakultas																
3.	Konfirmasi persetujuan dari pihak tempat PKL																
4.	Mengajukan judul tugas akhir																

Tahap Pelaksanaan												
5.	Melaksanakan praktik kerja lapangan											
6.	Melakukan wawancara kepada beberapa karyawan terkait pekerja											
7.	Melakukan observasi dan praktik kerja langsung											
Tahap Laporan												
8.	Melakukan observasi dan praktik kerja langsung											
9.	Menyusun laporan PK											